

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan mineral maupun kekayaan alam yang berupa flora dan fauna. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dipertahankan keberadaannya, dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta perlu dikelola secara terencana dan terpadu sesuai kemampuan daya dukung dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi yang berkesinambungan.

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kehutanan merupakan suatu usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha pembangunan tersebut dengan sendirinya akan memanfaatkan sumber daya alam, antara lain sumber daya hutan.

Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan nasional bagi usaha-usaha pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hutan harus dilaksanakan secara rasional dan lestari sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pertambahan penduduk Indonesia sebagai negara sedang berkembang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini sejalan dengan laju pembangunan yang sedang dilaksanakan di segala bidang. Pesatnya pembangunan dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap usaha pengelolaan dan pemeliharaan hutan merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk berarti meningkat pula kebutuhan hidup bagi penduduk, baik berupa bahan pangan, sandang, papan, maupun bahan industri. Sehingga mendorong antara invasi terutama pada areal yang berstatus milik negara, salah satunya adalah kawasan hutan. Pertambahan penduduk akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan lahan, sedangkan luas lahan relatif tetap. Hal ini mengakibatkan tekanan yang semakin berat terhadap lingkungan kawasan hutan (Kartosapoetra, 1985)

Bagi penduduk khususnya di sekitar hutan, hutan merupakan sumber daya alam yang disediakan bagi pemenuhan kebutuhan dan penghasilan mereka, karena itulah mereka mengadakan penebangan secara liar tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Akibat perkembangan penduduk, makin sempit tanah yang dimiliki manusia di daerah padat, penduduk mulai mendesak kawasan hutan, mereka melakukan pencangkulan-pencangkulan tanah, bercocok tanam palawija, mereka juga melakukan penebangan liar. Pengaruh dari perbuatan-perbuatan mereka akan mempercepat tererosinya

tanah dan air (Kartosapoetra, 1985). Secara rinci kerusakan hutan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data kondisi hutan di Provinsi Lampung Tahun 2006

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Kondisi Hutan (%)	
			Tidak Berhutan	Berhutan
1	Kawasan Hutan Lindung	317.615	79,86	20,14
2	TN Way Kambas	126.621	33,79	66,21
3	TN Bukit Barisan Selatan	300.426	33,79	66,21
4	Tahura Wan Abdul Rachman	22.246	33,79	66,21
5	Cagar Alam Laut Krakatau	13.735	33,79	66,21
6	Hutan Produksi Terbatas	33.358	33,79	28,91
7	Hutan Produksi Tetap	191.732	76,34	23,76
Jumlah		1.004.735	51,76	48,24

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006

Kerusakan hutan di Lampung sudah memasuki tahapan mencemaskan. Pada data di atas, dari luasan kawasan hutan 1.004.735 ha hutan di Provinsi Lampung kini hanya tersisa sekitar 48,24% yang masih berhutan dan 51,76% yang tidak berhutan. Pembukaan lahan dan penebangan liar (*illegal logging*) yang meningkat tajam terutama di era reformasi, menambah panjang deretan persoalan pengelolaan kehutanan di Lampung dengan tingkat kerusakan hutan hingga saat ini masih terus berlangsung.

Aspek lain juga memicu adanya eksploitasi secara berlebihan (*Over Exploitation*) terhadap sumber daya hutan adalah dengan penerapan otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000). Dalam tatanan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Hal tersebut merupakan sisi positif bagi pembangunan suatu daerah, tetapi disisi lain tuntutan atas

pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi beban tersendiri bagi sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan fakta di lapangan, perambahan itu tidak hanya dilakukan masyarakat yang berdomisili atau tinggal di sekitar kawasan hutan tetapi juga masyarakat yang datang dari tempat yang jauh dari kawasan hutan. Adapun latar belakang mereka merambah ke dalam kawasan hutan dengan keinginan untuk mendapatkan lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian.

Pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung pada tahun 1994 disosialisasikan ke dalam bentuk model percontohan. Dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-11/1995 Tanggal 20 November 1995, namun pelaksanaan di lapangan kegiatan Hutan Kemasyarakatan masih bersifat proyek. Demikian dengan pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan Perkebunan No. 677/Kpts-11/1998 Tanggal 7 Oktober 1998 juga SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 31/Kpts-11/2001 Tanggal 12 Februari 2001, kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung mendapat respons positif dari masyarakat.

Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung dan hasil kegiatan selalu dilaksanakan adalah kegiatan model percontohan pengembangan Hutan Kemasyarakatan. Dari hasil evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan yang telah dilaksanakan pada tahun 1975 sampai 1994 kegiatan rehabilitasi hutan tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan. Dikarenakan masih tingginya tingkat perambahan hutan baik areal yang belum

direhabilitasi maupun yang telah direhabilitasi. Secara rinci data kondisi penutupan lahan kawasan Tahura WAR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi penutupan lahan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Tahun 2006

Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Hutan lahan kering primer	5.778,00	26
Hutan lahan kering sekunder	2.892,42	13
Ladang tanah terbuka	1.019,12	5
Kebun campuran/pertanian	12.306,97	55
Semak belukar	252,80	1
Luas Tahura WAR	22.249,31	100

Sumber : UPTD Tahura WAR 2006

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa keadaan penutupan lahan di kawasan Tahura WAR sebagian besar telah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penggarapan lahan untuk usaha pertanian semusim dan kebun. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sekitar hutan belum merasa ikut bertanggung jawab akan keberhasilan dan kelestarian hutan sekitar, yang seharusnya tetap menjaga kelestarian kawasan Tahura WAR. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi berkaitan erat dengan penebangan liar, perambah, penjarahan, dan klaim kawasan. Selain itu pertambahan jumlah penduduk menjadi pendorong kerusakan hutan. Di daerah yang tanahnya kurang subur dan penduduknya masih mempunyai kebiasaan membuka hutan untuk perladangan, maka akan terus terjadi kerusakan lahan hutan. Kerusakan hutan telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang seharusnya menjadi modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Sebagian besar kawasan hutan berubah menjadi alang-alang dan semak belukar, karena kayunya telah habis ditebangi, dan paling menyedihkan lokasi bekas tebangan tersebut dijadikan sebagai tempat pemukiman dan perladangan yang menyebabkan fungsi hutan telah berubah. Hal ini terjadi karena adanya bentuk atau pola pengelolaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berlebihan

Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, paradigma pembangunan pun berubah kearah ekonomi kerakyatan. Begitu juga dengan sektor kehutanan, terjadi perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis sumber (*Resource Based Management*), mejadi pembangunan berbasis masyarakat (*Community Based Management*). Sebagai implementasi dari perubahan paradigma tersebut diterapkan Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang salah satunya adalah program Hutan Kemasyarakatan.

Dengan perubahan paradigma tersebut diharapkan masyarakat sekitar hutan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan kehutanan, tetapi lebih cenderung subyek sekaligus menjadi mitra pembangunan. Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif baik dari segi ekologis (kelestarian kawasan hutan dan fungsinya) maupun ekonomis (potensi berusaha), sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat dan menimbulkan efek positif terhadap kelestarian hutan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka pemerintah mencoba mencari alternatif pola rehabilitasi yang melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif untuk ikut serta bertanggung jawab akan keberhasilan kegiatan

rehabilitasi hutan secara komprehensif. Rehabilitasi hutan bersama masyarakat diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dapat diambil masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi tanpa merusak dan mengurangi fungsi hutan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka dilaksanakan kegiatan model percontohan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dialokasikan dalam pengembangan Hutan Kemasyarakatan Provinsi Lampung tahun 1994 atau 1995.

Desa Bogorejo merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura WAR yang merupakan daerah dataran tinggi. Jarak dari Desa Bogorejo menuju ke kawasan Tahura WAR hanya sekitar 4 km. Kemungkinan besar masyarakat Desa Bogorejo memilih untuk melakukan kegiatan ekonominya dengan cara bertani daripada pergi ke kota kecamatan yang belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Oleh karena itu, tidak aneh kiranya jika masyarakat Desa Bogorejo melakukan kegiatan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya di sekitar kawasan Tahura WAR. Jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak 4.689 jiwa yang terbagi ke dalam 1.003 kepala keluarga, dan memiliki struktur mata pencaharian yang sebagian besar adalah petani dan tidak sedikit dari mereka berusaha tani di dalam kawasan Tahura WAR.

Kegiatan PHBM dilakukan dalam bentuk pembangunan unit percontohan pemanfaatan hutan secara lestari di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman Reg 19 Gunung Betung Kabupaten Pesawaran. Pembangunan unit percontohan ini mengadopsi dari pola HKm yang mengalami penyesuaian

dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah masyarakat penggarap kawasan hutan yang berdomisili di sekitar kawasan yaitu di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Desa Bogorejo berdasarkan peta ubit lahan (land unit) yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agro Departemen Pertanian tahun 1995 umumnya cukup subur. Dalam kegiatan unit percontohan pemanfaatan hutan secara lestari ini, tanaman yang dapat merespon dengan baik adalah jenis-jenis tanaman *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) antara lain, durian, kemiri, petai, melinjo dan tangkil.

Selain itu diharapkan terjadi sinergi antara masyarakat dengan petugas kehutanan di lapangan dalam upaya melestarikan hutan secara bersama-sama. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bogorejo dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah dalam hal ini petugas kehutanan UPTD Tahura WAR Provinsi Lampung dengan cara menyiapkan perencanaan kegiatan mengelola hutan secara lestari. Dengan penyusunan rencana atau rancangan bersama kelompok tani (*Bottom Up planning*), maka aspirasi masyarakat sekitar hutan dapat ditampung.

Dengan cara ini diharapkan kegiatan rehabilitasi hutan dapat dilaksanakan dengan dukungan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekologis tanpa menyampingkan aspek ekonomis. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah merupakan penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat

dalam kegiatan PHBM, sehingga tingkat pendekatan partisipasi belum dapat terukur pasti keberhasilannya (Departemen Kehutanan, 2003).

Berkaitan dengan hal di atas, maka dianggap perlu untuk menelaah sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam program PHBM di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota kelompok tani hutan dalam program PHBM di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok tani dengan tingkat pendapatan rumah tangga petani?
4. Apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok tani dengan tingkat pendapatan pada kegiatan usahatani dalam kawasan hutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam program PHBM di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam program PHBM di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
3. Mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok tani dengan tingkat pendapatan anggota kelompok tani di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
4. Mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok tani dengan tingkat pendapatan pada kegiatan usahatani dalam kawasan hutan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan pertimbangan pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan sistem pelatihan agar lebih representatif sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan.
2. Bahan informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya petani dan instansi terkait dengan penelitian ini.
3. Wahana belajar bagi peneliti, didasarkan pada teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan yang ada di lapangan.